

Konflik antara Masyarakat dan Perusahaan

Jalal dan Fajar Kurniawan
Social Investment Indonesia

Dari mana datangnya konflik antara perusahaan dan masyarakat? Pertanyaan tersebut sangatlah relevan untuk diajukan ketika terjadi kondisi hubungan yang tidak baik di antara keduanya, seperti yang dalam beberapa hari terakhir terjadi antara PT Bumi Suksesindo dengan sebagian warga di tanggal 19 Oktober, serta 22 dan 25 November 2015. Tambang emas yang berada di Pulau Merah, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi itu kini menghentikan sebagian besar aktivitasnya, menunggu hingga suhu hubungan menjadi lebih sejuk.

Secara umum, hubungan antara perusahaan dan masyarakat sangat terkait dengan tiga hal besar, yaitu manajemen dampak, distribusi manfaat, serta perilaku perusahaan (Zandvliet dan Anderson, 2009; IFC, 2010). Masing-masing memiliki komponennya masing-masing. Manajemen dampak terdiri dari dampak langsung dan dampak tidak langsung. Distribusi manfaat terdiri dari peluang kerja, kesempatan usaha, dan proyek komunitas. Perilaku perusahaan terkait dengan persepsi masyarakat.

Setiap kali organisasi kami, Social Investment Indonesia, melihat situasi hubungan yang memanas bahkan hingga kondisi konflik, kami memulainya dengan menyelidiki bagaimana perusahaan tersebut melakukan manajemen dampaknya. Pada berbagai kasus, kami mendapati bahwa perusahaan memang memiliki kinerja yang tidak baik, sehingga masyarakat marah. Pencemaran yang dibiarkan, kemudian membuat masyarakat kehilangan daya dukung lingkungan sering kali membuat hubungan itu memburuk. Demikian juga, manajemen dampak sosial yang buruk—misalnya dalam pembelian lahan—juga kerap menyebabkan konflik.

Setelahnya, hal yang penting dilihat adalah bagaimana perusahaan itu berbagi manfaat dengan masyarakat. Sudah menjadi hukum besi bahwa perusahaan yang hadir di wilayah tertentu harus memberikan manfaat utama bagi wilayah itu. Logikanya sederhana, karena di wilayah itu perusahaan menimbulkan dampak, maka manfaat juga terutama harus diberikan di situ. Perusahaan sudah sepantasnya memilah mana saja jenis-jenis peluang kerja, kesempatan usaha, dan proyek yang bisa ditujukan untuk masyarakat setempat. Tentu, hal ini dilakukan sesuai dengan kapasitas, aset, dan kebutuhan masyarakat itu.

Terakhir, yang juga dilihat adalah perilaku perusahaan. Tentu, perilaku ini datang dari tindak tanduk pekerja perusahaan serta kontraktornya ketika berhadapan dengan masyarakat. Karena pekerja perusahaan dan kontraktor adalah tamu atau pendatang, maka persepsi masyarakat akan sangat terkait dengan kepantasan sebagai pendatang. Perusahaan harus mengetahui apa ekspektasi masyarakat terhadap perilaku itu, sehingga bisa menunjukkan hal-hal yang baik.

Secara umum, masyarakat berharap bahwa dampak perusahaan harus dilaksanakan hingga tak ada lagi dampak negatif yang merusak. Kalau ada dampak negatif residual, maka masyarakat mengharapkan adanya kompensasi. Tidak selalu dalam bentuk uang atau natura, melainkan bisa juga dalam bentuk program atau yang lain. Perusahaan juga diharapkan menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan pengelolaan dampaknya. Dalam distribusi manfaat, harapan masyarakat adalah perusahaan menunjukkan keadilan dan transparansi. Biasanya, masyarakat memiliki definisi yang baik tentang keadilan itu, namun perlu digali melalui penelitian sosial. Perilaku yang dianggap baik biasanya adalah hormat pada masyarakat, penuh perhatian kepada kebutuhan mereka, selain menegakkan transparansi.

Namun demikian, organisasi kami sangat sering melihat sumber konflik yang berbeda. Kami mendapati bahwa di banyak kasus di Indonesia, ketiga hal yang menjadi semacam *template* analisis hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di seluruh dunia itu tidaklah memadai. Kami mendapati bahwa

ada dua faktor lagi yang sangat kerap menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat, yaitu pengaruh kepentingan ekonomi-politik serta konflik internal perusahaan.

Oleh karenanya, ketika kami memeriksa hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan mendapati bahwa perusahaan sudah relatif baik—dalam pengelolaan dampak, distribusi manfaat, dan perilaku—namun tetap terjadi konflik, maka hipotesis tentang adanya kepentingan ekonomi-politik dan konflik internal akan diuji di lapangan.

Kepentingan ekonomi-politik biasanya berkelindan, walau bisa juga berdiri sendiri-sendiri. Kepentingan ekonomi yang biasanya menimbulkan konflik adalah ketika elit-elit di masyarakat menginginkan mendapatkan keuntungan ekonomi, paling kerap berupa kepentingan untuk mendapatkan kontrak bisnis dari perusahaan. Sementara, kepentingan politik biasanya juga berujung pada kehendak untuk mendapatkan keuntungan (tidak sah) dari perusahaan.

Periode Pemilu dan Pilkada biasanya menjadikan hubungan perusahaan dengan masyarakat menjadi rawan. Para politisi yang ingin mendapatkan pembiayaan finansial dari perusahaan akan melakukan apapun untuk mendapatkannya, termasuk dengan menunggangi masyarakat, dan mengompromi agar masyarakat menyerang perusahaan, dengan dalih-dalih tertentu. Motif yang lain biasanya adalah untuk menyerang petahana secara tidak langsung, dengan membuatnya tampak buruk, karena tidak mampu menjaga keamanan. Tentu, ini biasanya perbuatan musuh politiknya. Contoh-contoh soal ini sedemikian banyaknya di Indonesia.

Sementara, konflik internal juga biasa menjadi penyulut konflik eksternal. Yang paling sering muncul adalah ketidakpuasan pekerja lokal terhadap perusahaan (misalnya karena di-PHK), atau terhadap pekerja lainnya. Pekerja lain ini biasanya merupakan pendatang atau sesama pekerja lokal, namun berasal dari kelompok yang berbeda. Kami telah sering menemukan bahwa pekerja lokal yang berasal dari afiliasi politik yang berbeda telah banyak menimbulkan friksi di dalam perusahaan, dan membuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat menjadi tidak kondusif. Biasanya, pekerja yang berkonflik di dalam perusahaan itu melakukan fitnah terhadap lawannya dan menghasut masyarakat agar mendukung dirinya.

Beragam pengalaman kami di seluruh Indonesia, baik di industri pertambangan maupun industri lainnya, mengajarkan bahwa tidak seharusnya kita mengambil kesimpulan yang terlampau menyederhanakan masalah terkait dengan konflik. Perusahaan bisa saja bersalah karena mengelola dampaknya dengan buruk, membagi manfaat dengan tidak adil, dan/atau berperilaku tak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Namun kemungkinan lain juga kerap terjadi. Kami bahkan jauh lebih sering menemukan kasus-kasus konflik perusahaan versus masyarakat yang sesungguhnya disebabkan oleh kepentingan ekonomi-politik elit dan konflik internal perusahaan.

Buat perusahaan, kenyataan ini penting untuk menjadikan kehati-hatian. Menjelang Pemilu dan Pilkada kewaspadaan perlu ditingkatkan. Jangan mengambil posisi yang bisa merugikan perusahaan, misalnya dianggap terlampau dekat dengan kandidat tertentu. Demikian juga, pengelolaan hubungan dengan elit masyarakat dan pekerja perlu mendapatkan perhatian yang baik, agar benih-benih konflik tidak mewujud. Buat masyarakat, penting untuk mengingat bahwa bila perusahaan yang eksis itu ternyata selama ini kehadirannya menguntungkan masyarakat, hasutan seharusnya tidak didengarkan. Sedapat mungkin, objektivitas dalam memandang dampak, manfaat dan perilaku perusahaan dikembangkan, dan hubungan yang konstruktif terus diupayakan.

Jalal adalah ketua dewan penasihat (chairperson of advisory board) pada Social Investment Indonesia. Ia juga merupakan fellow dalam ekonomi hijau pada program IDEAS di Massachusetts Institute of Technology.

Fajar Kurniawan adalah pendiri dan managing partner Social Investment Indonesia dan alumni program social enterprise pada Mosaic Summer School, Cambridge University.